

**ANALISIS POTENSI *FRAUD* PADA PELAKSANAAN
E-PROCUREMENT DI INSTANSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
(Studi Kasus Pada Tahun Anggaran 2019-2021)
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Annisa Dwi Julianti

1703631

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2023

**ANALISIS POTENSI FRAUD PADA PELAKSANAAN E-
PROCUREMENT DI INSTANSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG
(Studi Kasus Pada Tahun Anggaran 2019-2021)**

Oleh

Annisa Dwi Julianti

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi
dan Bisnis

©Annisa Dwi Julianti

Universitas Pendidikan Indonesia

November 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak
ulang, difotokopi atau cara lainnya tanpa izin dari penulis

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS POTENSI FRAUD PADA PELAKSANAAN
E-PROCUREMENT DI INSTANSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
(Studi Kasus Pada Tahun Anggaran 2019-2021)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Annisa Dwi Julianti

1703631

Telah disetujui oleh:

Pembimbing,



Dr. Rozmita Dewi Yuniarti, S.Pd., M. Si

NIP. 197106292006042001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia**



Dr. Aristanti Widyaningsih, S. Pd., M.Si., CPMA., CRMP.

NIP. 197409112001122001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Potensi Fraud Pada Pelaksanaan *E-Procurement* Di Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pada Tahun Anggaran 2019-2021)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Dengan pernyataan ini, saya siap menerima risiko atau sanksi yang dijatuhkan pada saya bila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan

Annisa Dwi Julianti

ABSTRAK
ANALISIS POTENSI *FRAUD* PADA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*
DI INSTANSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
(Studi Kasus pada Tahun Anggaran 2019 – 2021)

Oleh :
Annisa Dwi Julianti
1703631

Dosen Pembimbing:
Dr. Rozmita Dewi Yuniarti, M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam risiko kecurangan dalam penerapan *e-procurement* atau LPSE pada instansi sekretariat daerah pemerintahan kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan sampel data purposive sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah subbagian pengadaan barang/jasa pada lembaga Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yaitu UKPBJ dan Unit LPSE dengan waktu penelitian antara tahun 2019-2021. Teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah potensi terjadinya fraud pada pelaksanaan pengadaan secara elektronik pada instansi tingkat daerah kabupaten Karawang ini ialah bersumber dari masih abunya transparansi yang diterapkan pada bagian ini. Perhitungan HPS dengan keuntungan penyedia yang tidak dibatasi persentasenya berpotensi menimbulkan potensi penggelembungan dana dan mark up. Selain itu, bertemunya calon penyedia dengan panitia pengadaan pada proses *anwijzing* yang harusnya sesuai peraturan dilakukan dengan sistem saja juga berpotensi menimbulkan celah fraud yakni gratifikasi atau suap. Potensi tersebut masih beresiko timbul karena integritas dan rasa tanggungjawab yang masih kurang dari pihak-pihak yang melakukan pengadaan. Instansi tingkat daerah Kabupaten Karawang termasuk didalamnya instansi sekretariat daerah telah membentengi pelaksanaan pengadaan dengan peraturan dan kode etik yang baik. Upaya peningkatan kompetensi pihak yang melakukan pengadaan juga masih terus dilaksanakan melalui berbagai pembinaan serta penyuluhan. Selain itu, penerapan e-katalog yang nantinya akan menggantikan metode pengadaan yang lainnya juga telah di upayakan.

Kata kunci: Kabupaten Karawang; Kecurangan; Pengadaan; Tata kelola yang baik

ABSTRACT

ANALYSIS OF POTENTIAL FRAUD IN THE IMPLEMENTATION OF E-PROCUREMENT IN THE REGIONAL SECRETARIAT INSTITUTION OF KARAWANG DISTRICT

(Case Study in Fiscal Year 2019 – 2021)

By :

Annisa Dwi Julianti

1703631

Supervised:

Dr. Rozmita Dewi Yuniarti, M. Si

This research aims to find out in depth the risk of fraud in the implementation of e-procurement or LPSE in the Karawang district government regional secretariat agency. This research uses a qualitative method with a purposive sampling data sampling technique. The sample taken in this research was the goods/services procurement subsection at the Karawang Regency Regional Secretariat institution, namely UKPBJ and the LPSE Unit with the research time between 2019-2021. The data credibility testing technique used in this research is source triangulation. Meanwhile, the data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The conclusion of this research is that the potential for fraud to occur in the implementation of electronic procurement at regional level agencies in Karawang district originates from the lack of transparency implemented in this section. HPS calculations with provider profits that are not limited in percentage have the potential to lead to potential fund inflation and mark ups. Apart from that, the meeting between prospective providers and the procurement committee during the anwijzing process, which should be carried out using a system alone, also has the potential to give rise to opportunities for fraud, namely gratuities or bribes. This potential is still at risk of arising due to the lack of competence and sense of responsibility from the parties carrying out the procurement. Karawang Regency regional level agencies, including the regional secretariat agency, have protected procurement implementation with good regulations and codes of ethics. Efforts to increase the competency of those carrying out procurement are also continuing to be carried out through various coaching and counseling. Apart from that, the implementation of e-catalogs which will replace other procurement methods has also been attempted.

Keywords. *E-Procurement; Fraud; Good Governance; Karawang District*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan kuasanya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Analisis Potensi *Fraud* pada Pelaksanaan *E-Procurement* di Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Peneliti juga mengucapkan terimakasih atas bimbingan dari Ibu Dr. Rozmita Dewi Yuniarti, M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, serta pada pihak-pihak lainnya yang telah membantu peneliti.

Peneliti berharap penelitian yang diajukan ini, dapat memberikan manfaat pada pengembangan bidang terkait. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran untuk perbaikan sangat peneliti nantikan.

Purwakarta, Januari 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kajian Teori	8
2.1.1 <i>Good Governance and Clean Government</i>	8
2.1.2 Pemerintahan Daerah	8
2.1.3 Sekretariat Daerah	8
2.1.4 Kabupaten Karawang	9
2.1.4 <i>Fraud</i>	9
2.1.5 Teori <i>Diamond Fraud</i>	11
2.1.6 <i>Fraud</i> di Indonesia	12
2.1.7 Pengadaan	13

2.1.8 Pengadaan Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>)	16
2.1.9 Potensi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	32
2.1.10 Upaya pengendalian potensi <i>fraud</i>	34
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III	39
METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Desain Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan waktu penelitian.....	42
3.3 Sumber dan Jenis Data	44
3.3.1 Sumber data primer	45
3.3.2 Sumber data sekunder	45
3.4 Narasumber	45
3.5 Instrumen Penelitian.....	46
3.6 Pengujian Kredibilitas Data.....	48
3.6.1 Triangulasi	48
3.7 Teknik Analisis Data	49
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Institusi	54
4.1.1 Profil Sekretariat Kabupaten Karawang	54
4.1.2 Narasumber Penelitian	59
4.2 Uji Kredibilitas Data	61
4.2.1 Triangulasi	61
4.3 Hasil Analisis Data.....	86
4.3.1 Data Koleksi.....	86
4.3.2 Reduksi Data	102
4.4 Pembahasan Hasil Analisis Data	137
4.4.1 Potensi <i>Fraud</i>	140
4.4.2 Upaya pencegahan.....	146
4.4.3 Keterbatasan Penelitian	147
BAB V	147

SIMPULAN, DAN SARAN	147
5.1 Simpulan	147
5.2 Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN.....	xx

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Penindakan korupsi oleh KPK tahun 2004 hingga 2022	3
Gambar 2.1.4 Fraud Tree	11
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 3.1 Diagram Fishbone Analisis Data Secara Keseluruhan.....	40
Gambar 4.1.1 Gedung Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 4.1.2 Struktur organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Karawang	55
Gambar 4.4.1 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa.....	102
Gambar 4.4.2 Paket pengadaan pada satuan kerja Sekretariat Daerah dengan metode pengadaan langsung.....	103
Gambar 4.4.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	42
Tabel 3.2.2 Waktu Penelitian.....	43
Error! Reference source not found.....	45
Tabel 4.2.1 Triangulasi Sumber.....	61
Tabel 4.3.1 Hasil Wawancara Sebelum Direduksi.....	86
Tabel 4.3.2 Reduksi Data.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Formulir Frekuensi Bimbingan	xx
LAMPIRAN 2: Matriks Perbaikan Seminar	xxii
LAMPIRAN 3: Lembar Persetujuan Perbaikan Draft Proposal Skripsi	xxvi
LAMPIRAN 4: Matriks Perbaikan Ujian Sidang	xxvii
LAMPIRAN 5: Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi	xxviii
LAMPIRAN 6: Riwayat Hidup	xxix

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, S. (2002). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Akmal. (2009). *Pendekatan Pemeriksaan Internal Manajemen Internal Audit* (Vol. 2).
- Ardito, R. (2020a, Agustus 26). KPK Sebut 70 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821/kpk-sebut-70-persen-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Ardito, R. (2020b, September 24). KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/18052661/kpk-tetapkan-eks-kadis-pupr-lampung-selatan-jadi-tersangka?page=all>
- Arfah, E. A. (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung). *Jurnal Investasi*, 7(2), 137–153.
- Arifianti, R., Santoso, B., & Handajani, L. (2015). Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi NTB. *Jurnal Investasi*, 11(2), 195–213.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1132>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2008). *Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse: 2008 global fraud study*.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2010). *Report to the nations on occupational fraud and abuse 2010 Global Fraud Study*.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2014). *Report to the Nations on*

Occupational Fraud & Abuse: 2014 Global Fraud Study.
<https://doi.org/10.3103/S106833721405003X>

Association of Certified Fraud Examiners. (2016). *Report To the Nations On Occupational Fraud and Abuse 2016.*

Association of Certified Fraud Examiners. (2018). *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2018 Global Fraud Study.*

Association of Certified Fraud Examiners. (2019). *Survei Fraud Indonesia Tahun 2019.*

Association of Certified Fraud Examiners. (2020). *Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2020 global fraud study.*

Bkp sdm Kabupaten Karawang. (2019). *Pemerintah Kabupaten Karawang meraih penghargaan dari KPK.* Berita BKP SDM Kabupaten Karawang.
<https://bkpsdm.karawangkab.go.id/pemerintah-kabupaten-karawang-meraih-penghargaan-dari-kpk/>

Bogdan, R., & Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (A. Rurchan (Ed.)). Usaha Nasional.

BSSN. (n.d.). *Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa.*

Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement.* USA: *The Free Press.*

Denzin, N. K., & S. Lincoln, Y. (2011). *The Sage Hand Book of qualitative reseach* (4 ed.). Sage.

Dr. J R., R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.*

Ferwerda, J., Deleanu, I., & Unger, B. (2017). *Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators.* *European Journal on Criminal Policy and Research*, 23(2), 245–267. <https://doi.org/10.1007/s10610-016-9312-3>

Fitri, F., & Nadirsyah, N. (2019). *Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan*

(Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), Dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 412–427.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15437>

Flick, U. (Ed.). (2014). *Qualitatif Data Analysis*. Sage Publications.

Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. PT Grasindo Anggota IKAPI.

Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Studi, Grounded Theory, Etnografi, Biografi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Indonesia Corruption Watch. (2018). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*.
<https://icw.or.id/ZNS>

Irfan, K. (2021, April 20). Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/11470741/kasus-pengadaan-darurat-covid-19-di-bandung-barat-kpk-periksa-kasi>

Isa. (2021, Januari 20). Kronologi Kasus Korupsi Citra Satelit: Rekayasa Sejak Awal. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210120192455-12-596348/kronologi-kasus-korupsi-citra-satelit-rekayasa-sejak-awal>

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 51 TAHUN 2021, (2021).

Kabupaten Karawang. (2022). *Gambaran Umum Kabupaten Karawang*.
 Karawang.go.id. <https://www.karawangkab.go.id/selayang-pandang>

Kemendikbud. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kementrian Keuangan. (2010). Potensi dan Strategi Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Kemenkeu.go.id*.

- KOMINFO. (2020). *Hasil Survei PBB, e-Government Indonesia Naik Peringkat*. kominfo.go.id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30024/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat/0/artikel>
- KPK. (n.d.). *Statistik penindakan TPK berdasarkan jenis perkara*. KPK.go.id. Diambil 7 Juli 2023, dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenisperkara>
- KPK. (2020, Desember 4). *KPK Tahan Tersangka Dugaan Suap PBJ Kementerian Agama Tahun 2011*. *Siaran pers KPK*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1982-kpk-tahan-tersangka-dugaan-suap-pbj-kementerian-agama-tahun-2011>
- Kuntadi, C. (2015). *SIKENCUR*. PT Elex Media Komputindo.
- Kuntadi, C. (2017). *SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan) Edisi Revisi (5 ed.)*. PT Elex Media Komputindo.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Liputan 6. (2020, Juli 16). *Wawan Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi Alkes di Banten dan Tangsel*. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4307590/wawan-divonis-4-tahun-penjara-terkait-korupsi-alkes-di-banten-dan-tangsel>
- Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, (2011).
- Peraturan lembaga nomor 17 tahun 2018 mengenai Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018).
- Surat edaran kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020, (2020).
- Peraturan Lembaga nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa, (2021).

Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, (2021).

Peraturan LKPP NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, (2021).

LPSE KABUPATEN KARAWANG. (n.d.). *Tentang Kami*. Diambil 9 November 2023, dari <https://lpse.karawangkab.go.id/eproc4/publik/tentangkami>

Matza, S., Rahmawati, D. E., Nurmandi, A., & Suswanta, S. (2020). Corruption in Procurement of Goods and Services in Makassar City. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2), 128–138. <https://doi.org/10.18196/jgpp.72128>

Miles, A., & Huberman, M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*.

Movanita, A. (2017). Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi. *Kompas*.

Mulyadi, M. (2011). PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTA PEMIKIRAN DASAR MENGGABUNGKANNYA. *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA*, 15 (1), 127–137.

Nurulliah, N. (2020, Juli 6). Pemprov Jabar Raih Level Proaktif Terkait Pencegahan Korupsi Barang dan Jasa. *Pikiran Rakyat*.

Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (2 ed.). Sage Publications.

Undang-undang No 22 tahun 1999, (1999).

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, (2000).

PP Nomor 101 tahun 2000, (2000).

Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003, (2003).

Undang-Undang No 23 Tahun 2004, (2004).

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007, (2007).

Peraturan Presiden no 54 tahun 2010, (2010).

- Peraturan daerah provinsi jawa barat tahun 2020 tentang Pedoman penilaian kinerja penyedia barang/jasa, (2020).
- Peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2021).
- Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2019).
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (2018).
- Peraturan presiden nomor 26 tahun 2021.* (2021).
- Poerwandari, E. K. (2005). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Universitas Indonesia.
- Rendon, J. M., & Rendon, R. G. (2016). Procurement fraud in the US Department of Defense: Implications for contracting processes and internal controls. *Managerial Auditing Journal*, 31(6–7), 748–767. <https://doi.org/10.1108/MAJ-11-2015-1267>
- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, (2009).
- Rustiarini, N. W., T. S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view. *Journal of Public Procurement*, 19(4), 345–362. <https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012>
- Sargiacomo, M., Ianni, L., D’Andreamatteo, A., & Servalli, S. (2015). Accounting and the fight against corruption in Italian government procurement: A longitudinal critical analysis (1992-2014). *Critical Perspectives on Accounting*, 28, 89–96. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.006>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6 ed.). Salemba

empat.

Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan. (n.d.). *Profil E-Procurement*. Diambil 3 September 2021, dari <https://setjen.kemenkeu.go.id/>

Sikka, P., & Lehman, G. (2015). The supply-side of corruption and limits to preventing corruption within government procurement and constructing ethical subjects. *Critical Perspectives on Accounting*, 28, 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.008>

Singleton, T., Singleton, A., Bologna, J., & Lindquist, R. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting Third Edition* (3 ed.). Wiley.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.

Tuanakotta, & M., T. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).

Weygandt Kimmel Kieso. (2015). Fraud, Internal Control, and Cash. In *Financial Accounting 3e* (3 ed.). Wiley.

William, D., & Presutti, J. (2003). Supply management and eprocurement: creating value added in the supply chain. *Industrial Marketing Management*, 32(2), 219–226.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) ‘The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant’, *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.

Zulaikha, Z., & Hadiprajitno, P. T. B. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi

Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 194–220.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2016.11>